

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI PROGRAM BAPAK ASUH ANAK *STUNTING* (BAAS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI

Kharisma Nurul Akmalisya¹, Tri Yuniningsih²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify the stakeholders involved, analyze their roles, and evaluate the supporting and inhibiting factors in accelerating the reduction of stunting through the Bapak Asuh Anak Stunting Program (BAAS) in Pati Regency. Using Riant Nugroho's "Five Rights" theory, this study is a descriptive qualitative research. Data was collected through in-depth interviews and observations, with informants selected using a snowball sampling technique. The results show that the role of the Pati Regency government is still very dominant in program implementation, but coordination between Regional Apparatus Organizations (OPD) is not yet optimal. Some of the main obstacles are the lack of effective collaboration among stakeholders and the absence of clear standard operating procedures (SOPs) to regulate the roles of each party. In addition, the participation of the community and the private sector in supporting this program still needs to be improved. The main supporting factor is the commitment of the local government, which is realized through local policies and innovations such as the BAAS Program. This study recommends strengthening cross-sectoral coordination, enhancing stakeholder capacity, and empowering the community as strategic steps to support the success of the BAAS program in accelerating the reduction of stunting in Pati Regency.

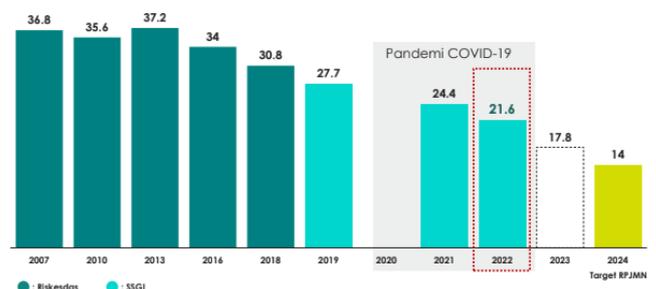
Keywords: *stakeholders, stunting, BAAS Program.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. *Stunting* merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Upaya penurunan angka *stunting*, merupakan salah satu aspek penting dalam SDGs adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan.



Gambar 1 Grafik Angka *Stunting* di Indonesia dari tahun 2017 - 2022

Di Indonesia, angka prevalensi *stunting* menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2016, namun target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 masih memerlukan upaya yang lebih signifikan. Kabupaten Pati, salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, juga menghadapi tantangan serius dalam upaya penurunan *stunting*. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati meningkat sebesar 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

TAHUN	DASAR PERHITUNGAN	
	SSGI (Survey Status Gizi Indonesia)	e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
2020		5,68%
2021	20,6%	5,76%
2022	23%	5,43%
2023	??	??

Gambar 2. Angka Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pati tahun 2020 – 2022

Kabupaten Pati telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka *stunting*, Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Program BAAS menyediakan berbagai bentuk dukungan, seperti asupan gizi, akses air bersih, dan fasilitas sanitasi yang layak, untuk anak-anak berisiko *stunting*. Dukungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Inovasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi

stakeholder dalam upaya percepatan penanganan *stunting*. Meskipun program ini telah menunjukkan hasil positif, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati tetap memerlukan perhatian khusus. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2022, angka prevalensi *stunting* masih tergolong tinggi, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas program dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*, intervensi spesifik dan sensitif menjadi kunci keberhasilan. Intervensi spesifik menasar langsung pada kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi, ditujukan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak balita. Sementara itu, intervensi sensitif melibatkan berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, sanitasi, dan pertanian, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

Penanganan *stunting* memerlukan pendekatan multisektor, melibatkan sektor kesehatan, gizi, pertanian, pangan, serta partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil. Pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif ini diharapkan mampu mendorong tercapainya target nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati.

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) diinisiasi untuk mendukung penurunan *stunting* melalui peran

stakeholder, namun implementasinya belum optimal. Kurangnya koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tantangan dalam perumusan kebijakan menjadi perhatian utama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui Program BAAS di Kabupaten Pati, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dilihat dari teori 5 tepat milik Riant Nugroho?
2. Siapa sajakah *stakeholders* yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *tunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?
3. Bagaimana peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?
4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?

Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi program program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dilihat dari teori 5 tepat milik RiantNugroho dalam percepatan penurunan *stunting*.
2. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.
3. Menganalisis peran *stakeholders* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati.
4. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam percepatan penurunan *stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Pati dengan subjek penelitian yang meliputi pemerintah daerah, Tim Pendamping Keluarga (TPK), organisasi perangkat daerah (OPD), sektor swasta, dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Data primer dikumpulkan melalui

wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*. Selama proses pengumpulan data, pemilihan informan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. (Patton, 1986:35). Data sekunder diperoleh melalui telaah dan eksplorasi jurnal, buku, dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan berita yang relevan dengan pelaksanaan dan peran *stakeholder* dalam Program BAAS. Teknik analisis data dilakukan secara tematik, meliputi reduksi data, penyajian data dalam narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang relevan. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati

Implementasi kebijakan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati menurut Riant Nugroho (2012) dapat dilihat dari lima ketepatan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses sebagai berikut :

a. Tepat Kebijakan

Suatu kebijakan dianggap tepat apabila tujuan terlaksana dengan baik, dan hasil

yang diperoleh mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014: 686). Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dirancang secara tepat untuk mengatasi permasalahan *stunting* dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan kebutuhan mendesak yang hadir sebagai respons terhadap tingginya angka *stunting* pada tahun 2020, dengan fokus utama pada pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak berisiko *stunting*, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BAAS terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 18% pada tahun 2023 yang relevan dan juga responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pengalihan fokus program BAAS untuk pembangunan jamban sehat ketika anggaran PMT tersedia dari Dinas Kesehatan, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak tumpang tindih tetapi justru melengkapi kebijakan yang sudah ada. Secara keseluruhan, Program BAAS merupakan tepat kebijakan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati.

b. Tepat pelaksanaan

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Riant Nugroho (2014: 686) berpendapat bahwa dalam implementasi kebijakan pemerintah tidak hanya satu-satunya aktor dalam implementasi kebijakan, ada lembaga lain yang menjadi pelaksana.

Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati melibatkan berbagai *stakeholders*, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya. Kolaborasi antar aktor pelaksana memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

BAPPERIDA bertindak sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi, sedangkan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas memberikan panduan teknis terkait kebutuhan gizi. TPPS berperan strategis sebagai penghubung antar tingkatan administrasi, memastikan pelaksanaan program terorganisasi dan tepat sasaran. Di tingkat desa, Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengidentifikasi kelompok sasaran, mendistribusikan PMT, dan memastikan intervensi relevan.

Dengan pendekatan kolaboratif, pelaksanaan BAAS mencakup aspek penentuan target, sosialisasi, koordinasi, monitoring, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Ketepatan pelaksanaan BAAS di Kabupaten Pati menciptakan dampak signifikan dalam percepatan penurunan *stunting*.

c. Tepat Target

Ketepatan target sebagaimana dikemukakan Riant Nugroho (2014: 687) adalah suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan keperluan target kebijakan.

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dengan fokus sasaran utamanya, yaitu ibu hamil (bumil), bayi di bawah dua tahun (baduta), dan balita dari keluarga berisiko *stunting*. Seleksi penerima dilakukan secara berjenjang dengan validasi ketat oleh TPPS dan melibatkan dokter spesialis gizi untuk memastikan ketepatan target penerima.



Gambar 3. Penyaluran PMT Program BAAS

Penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati, dari 23% pada tahun 2022 menjadi 18% pada tahun 2023, dengan target 14% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi. Program BAAS dapat dikategorikan sebagai program yang tepat sasaran karena pendekatan berbasis data, seleksi penerima yang cermat, dan fokus pada kelompok prioritas.

d. Tepat Lingkungan

Riant Nugroho (2014) mendefinisikan ketepatan lingkungan sebagai kesesuaian suatu kebijakan dengan konteks politiknya, termasuk interaksi antar lembaga terkait. Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati, berhasil melalui sinergi harmonis antara

pembuat kebijakan, pelaksana, dan *stakeholder* lainnya. Kolaborasi solid antar lembaga internal, seperti BAPPERIDA, Dinas Kesehatan, dan TPPS, memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Penelitian yang dilakukan Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). mendukung koordinasi dan monitoring sebagai bentuk dari lingkungan kebijakan. Dukungan eksternal dari masyarakat, pemerintah pusat, media, dan tokoh masyarakat memperkuat persepsi positif terhadap program. Penerima manfaat, terutama keluarga kurang mampu, menyambut baik intervensi program sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan anak dan menurunkan angka *stunting*. Persepsi publik yang baik dan partisipasi aktif masyarakat memperkuat dampak positif program ini.

e. Tepat Proses

Mengacu pada Riant Nugroho (2014), ketepatan proses dalam implementasi kebijakan publik ditandai mekanisme yang memastikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan baik di kalangan pelaksana maupun penerima manfaat. Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai tepat proses karena dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dengan perencanaan yang komprehensif, di mana

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) memetakan kelompok sasaran utama, seperti calon pengantin (Catin), ibu hamil (Bumil), bayi di bawah dua tahun (Baduta), dan balita. Data yang digunakan berasal dari Dinas Kesehatan, kemudian divalidasi langsung di lapangan oleh tim penggerak PKK, memastikan akurasi dan mencegah salah sasaran. Penerima manfaat menggunakan kriteria yang ketat, termasuk status ekonomi dan kondisi gizi. Setiap intervensi, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), didokumentasikan dan dipantau dampaknya terhadap status gizi penerima oleh TPK Desa.

Antusiasme masyarakat penerima manfaat, khususnya keluarga kurang mampu, yang merasa terbantu oleh intervensi langsung seperti PMT dan fasilitas sanitasi. Edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh TPPS berhasil menciptakan pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat, memperkuat keberhasilan program dalam menciptakan dampak yang signifikan bagi percepatan penurunan *stunting*.

Secara keseluruhan, implementasi BAAS berjalan dengan tepat dan efektif dengan didukung oleh mekanisme pemantauan dan pelaporan yang baik. Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Pati berhasil diimplementasikan secara baik, signifikan dalam percepatan penurunan *stunting*.

Teori implementasi pada dasarnya mempelajari bagaimana kebijakan atau program diubah menjadi tindakan nyata.

Dalam konteks analisis *stakeholder*, hasil dari ketepatan implementasi kebijakan sangat berguna untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam proses implementasi suatu kebijakan atau program. Selain itu, ketepatan implementasi dijadikan saran untuk memahami hubungan antar *stakeholder* saling mempengaruhi, dan dipengaruhi dalam konteks implementasi. Implementasi kebijakan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat atau memfasilitasi proses implementasi. Teori implementasi menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis *stakeholder*. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami kompleksitas proses implementasi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan program.

Identifikasi Stakeholders Yang Terlibat Dalam Penurunan Stunting Melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Pati

Implementasi Program BAAS di Kabupaten Pati melibatkan berbagai *stakeholders* yang memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) dimana akan secara signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan program yang berbeda-beda. Sesuai teori oleh Aden dan Ackerman dalam Bryson (2004) membagi kelompok *stakeholders* menjadi 4 yakni

Key Player (pemain kunci), *Context Setter* (pendukung), *Subject* (subjek) dan *Crowd* (pengikut lain).

a. Key Player

Key Players didefinisikan sebagai *stakeholder* yang memiliki kekuasaan yang besar dan mempunyai pengaruh yang tinggi. Mereka berperan langsung dalam keberhasilan program dan harus terus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan penelitian Sandy (2020), *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang signifikan harusnya diikutsertakan secara aktif dalam seluruh tahapan siklus program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

1) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Bapperida Kabupaten Pati memiliki peran sentral sebagai penggerak utama Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Sebagai pembuat kebijakan dan koordinator multisektor, Bapperida bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan anggaran, dan evaluasi program. Peran Bapperida yang kuat menjadikannya *stakeholder* kunci dalam keberhasilan implementasi BAAS.

2) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati memainkan peran strategis dalam Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dengan otoritasnya,

Sekda mengkoordinasikan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, dan masyarakat untuk bersinergis menurunkan *stunting*.

Kepentingan Sekda terletak pada keberhasilan BAAS sebagai prioritas pemerintah daerah, dengan tanggung jawab memastikan integrasi intervensi spesifik (PMT) dan sensitif (pembangunan jamban sehat) untuk menangani akar masalah *stunting*. Perannya sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan mitra strategis memastikan keberlanjutan kebijakan dan sumber daya, menciptakan komitmen bersama untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pati.

3) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) melalui kontribusi teknis, seperti penyediaan data target penerima manfaat, penyusunan rekomendasi menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta edukasi gizi dan kesehatan kepada masyarakat. Pengaruh Dinas Kesehatan terlihat dari kemampuannya memberikan masukan strategis terkait menu PMT yang sesuai. Meskipun bukan pelaksana utama program, Dinas Kesehatan berkontribusi besar dalam mendukung keberhasilan BAAS melalui panduan gizi, pengelolaan data, dan edukasi, sehingga memperkuat

keberlanjutan dan dampak program untuk menurunkan *stunting* di Kabupaten Pati.

4) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Dinsos bertanggung jawab dalam koordinasi administratif, pengelolaan anggaran TPPS, dan memastikan kelancaran pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Dinsos menjadi penghubung antara OPD, pemerintah desa, dan donatur. Kepentingan utamanya terletak pada pemberdayaan keluarga dan pengentasan *stunting*, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

Pihak-pihak yang berperan sebagai *key players* terlibat secara aktif dalam implementasi program Bapak Asuh Anak *Stunting* yang berpengaruh terhadap keberhasilan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati.

b. Subject

Subject merupakan *stakeholders* yang memiliki *interest* (kepentingan) yang tinggi tetapi tidak memiliki *power* (kekuasaan) yang besar. Mereka merupakan pelaksana lapangan yang berinteraksi langsung

dengan target sasaran dalam implementasi program. TP PKK Desa dan masyarakat adalah *subject* dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati. TP PKK Desa bertugas mendistribusikan PMT, memberikan edukasi, dan berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran, meski tidak terlibat dalam pengambilan keputusan program. Sementara itu, masyarakat khususnya ibu hamil, baduta, dan balita merupakan penerima manfaat utama dengan kepentingan tinggi terhadap keberhasilan program. Menurut penelitian sebelumnya oleh Alifisyiam, F. N., Herawati, A. R., & Purnaweni, H. (2024) menyatakan bahwa masyarakat sebagai *subject* dalam penurunan *stunting*. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena berkepentingan langsung dalam keberhasilan program ini. Namun, pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan program relatif rendah.

c. Context Setter (Pendukung)

Context Setter merupakan *stakeholders* yang mempunyai kekuatan atau tingkat pengaruh yang besar tetapi untuk kepentingan yang dimiliki rendah. Mereka tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan tetapi mendukung keberhasilan program melalui kebijakan atau sumber daya. TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) bertindak sebagai koordinator lintas sektor dalam menurunkan angka *stunting* dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.

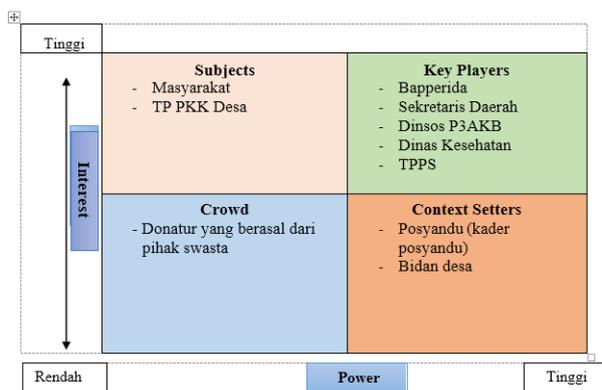
Posyandu, termasuk kader dan bidan desa, berperan sebagai penghubung langsung ke masyarakat, memberikan akses dan intervensi tepat kepada kelompok sasaran. Meski hanya berperan sebagai *stakeholder* pendukung, *context setter* juga perlu diperhatikan keberadaannya. Selaras dengan hal tersebut, Sandy (2020) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa hubungan yang baik dengan *stakeholder context setters* perlu untuk dijaga agar mereka dapat terus berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan.

d. Crowd (Pengikut Lain)

Crowd atau pengikut lain dapat dikategorikan sebagai *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap implementasi program. Meskipun demikian, kontribusi tidak langsung mereka perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap pengambilan keputusan untuk pencapaian program.

Stakeholder tipe *crowd*, yaitu donatur dari pihak swasta (misalnya CSR Bank Jateng dan BAZNAS dan pihak lainnya), berperan sebagai pendukung di balik layar dalam Program BAAS. Mereka memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam bentuk dukungan finansial dan non-finansial, untuk mendukung keberlanjutan program. Meskipun keterlibatan mereka bersifat pasif dan tidak langsung, dukungan ini melengkapi upaya pemerintah Kabupaten Pati dalam menurunkan angka

stunting. Penelitian sebelumnya oleh Alifisyiam, F. N., Herawati, A. R., & Purnaweni, H. (2024) yang menunjukkan bahwa pihak swasta seringkali berperan sebagai pendukung di belakang layar dalam program-program sosial. Meskipun keterlibatan mereka pasif, pihak swasta berkesempatan menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam forum-forum koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Ni'mah dkk (2019) yang menunjukkan bahwa suara dari kelompok masyarakat umum, meskipun memiliki pengaruh yang terbatas, tetap perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui berbagai bentuk bantuan dan fasilitas pendukung, pihak swasta berperan aktif dalam keberhasilan program.



Matriks *Power-Interest* dalam Program BAAS

Peran Stakeholders Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Di Kabupaten Pati

Peran *stakeholders* merujuk pada

identifikasi kontribusi masing-masing pihak dalam suatu kebijakan. Analisis peran akan menggambarkan keterlibatan setiap *stakeholder* dalam upaya penurunan *stunting*. Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017) peran *stakeholders* diklasifikasikan ke dalam lima peran yaitu sebagai berikut :

a. Policy creator

Menurut (Nugroho et al., 2014), *policy creator* adalah pihak atau aktor yang memiliki wewenang untuk membuat dan menyampaikan keputusan atau kebijakan tertentu. Kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah, dengan *policy creator* memiliki peran penting dalam merancang kebijakan atau program. Dalam percepatan penurunan *stunting* melalui Program BAAS di Kabupaten Pati, BAPPERIDA dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati berperan sebagai *policy creator*. Mereka mempunyai peran dalam merencanakan dan mengkoordinasikan program pembangunan serta pemanfaatan sumber daya, sesuai dengan tugas Bapperida yang tercatat dalam penelitian Salsabela (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021) kebijakan intervensi gizi sensitif merupakan upaya multisektoral yang melibatkan berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ini menjadi tanggung jawab bersama.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi

pemain kunci sekaligus menjadi penginisiasi inovasi Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati yang bertugas dalam perancangan program, pembuat kebijakan, pengambil keputusan dan penentu kebijakan BAAS.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai ketua TPPS mulai tahun 2024 juga menguatkan posisi sebagai policy creator dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program BAAS di Kabupaten Pati. Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis melalui koordinasi dengan OPD lainnya.

b. Coordinator

Menurut (Nugroho et al., 2014), koordinator adalah aktor yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dengan pihak lainnya. Sedangkan menurut (Astuti et al, 2000), bahwa peran koordinator adalah sebagai penghubung memiliki tugas yang penting dalam jaringan, yaitu membantu dalam membangun rasa percaya diantara berbagai pihak yang terlibat. Dalam penelitian Nugroho, A. Y. (2022). juga mendukung bahwasanya tugas koordinator adalah melakukan koordinasi dengan OPD ataupun *stakeholders* yang terlibat dalam program.

TPPS memainkan peran penting sebagai koordinator dalam pelaksanaan Program BAAS di Kabupaten Pati di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.. Mereka bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai *stakeholder*,

termasuk OPD, TP PKK, Kader Posyandu, dan donatur seperti BAZNAS dan perusahaan CSR. TPPS memastikan sinergi antar pihak terkait, memetakan kebutuhan, dan memantau distribusi bantuan. Dengan struktur koordinasi yang terorganisir dan rapat rutin, TPPS memastikan program berjalan fleksibel dan efisien.

Koordinasi yang dilakukan terkait dengan pendataan target penerima manfaat Bapak Asuh Anak *Stunting*, pemberian informasi kepada warga melalui TP PKK desa dan kecamatan, rapat koordinasi dengan para donatur, dan juga rapat koordinasi dengan semua anggota TPPS itu sendiri.

Peran TPPS sebagai koordinator tidak hanya berfokus pada implementasi teknis, tetapi juga menciptakan lingkungan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pati

c. Fasilitator

Menurut (Nugroho et al., 2014), peran fasilitator adalah membantu kelompok mencapai tujuannya dengan cara menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memandu proses kerja kelompok.

Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan berperan penting dalam penurunan *stunting* melalui program BAAS di Kabupaten Pati. Dinsos P3AKB berfungsi sebagai fasilitator utama, menyelenggarakan kegiatan

koordinasi seperti *sharing session* dan *focus group discussion* antar *stakeholder*. Sebagai sekretariat TPPS, Dinsos juga mengelola dana program dan memastikan pelaksanaan program berjalan sinergis di antara semua pemangku kepentingan.

Menurut Sujendra & Ip (2019), fasilitator tidak hanya melakukan koordinasi melalui penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga dapat melibatkan fasilitas nonfisik seperti pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan berperan penting dalam program BAAS dengan menyediakan data target *stunting*, panduan menu gizi, dan pelatihan untuk kader desa serta TPPS. Data yang akurat memastikan intervensi tepat sasaran, sementara panduan menu membantu masyarakat menyediakan makanan bergizi. Kolaborasi dengan Dinas Sosial P3AKB sebagai fasilitator memastikan koordinasi yang baik, menjadikan implementasi program lebih efisien dan terorganisir. Peran fasilitator ini menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati.

d. Implementor

Menurut (Nugroho et al., 2014), implementer adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan berhubungan langsung dengan kelompok sasaran dalam pelaksanaannya. Implementasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati melibatkan beberapa

stakeholder sebagai implementor, yaitu TP PKK Desa, Kader Posyandu, dan masyarakat. TP PKK Desa dan Kader Posyandu bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan program, mulai dari penyediaan dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (*baduta*). Mereka juga memastikan program berjalan sesuai arahan dan mendokumentasikan hasilnya. Masyarakat, sebagai penerima manfaat, mendapatkan intervensi gizi dan kesehatan untuk menurunkan angka *stunting*. Koordinasi yang baik antara kabupaten, kecamatan, dan desa memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Sejalan dengan hasil penelitian dari Wardhani, L., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023) yang menyatakan bahwa Masyarakat merupakan implementor dalam implementasi percepatan penurunan *stunting*. Tanpa ada partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang dilakukan pemerintah, tidak bisa berjalan baik.

Masyarakat menyambut baik Program BAAS karena memberikan manfaat langsung dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dengan adanya peran aktif dari TP PKK Desa, Kader Posyandu, dan masyarakat, program ini berjalan efektif dan efisien. Bantuan yang diberikan sesuai dengan data yang telah disusun, memastikan intervensi tepat sasaran.

e. Akselerator

Menurut (Nugroho et al., 2014), akselerator adalah pemangku kepentingan yang berperan untuk mempercepat suatu program dan memungkinkannya mencapai tujuannya dalam waktu tertentu atau lebih cepat. Akselerator membantu pemangku kepentingan lainnya mempercepat proses implementasi program.

Peran akselerator dalam Program BAAS di Kabupaten Pati dijalankan oleh donatur dari berbagai sektor, termasuk individu, organisasi, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Mereka berkontribusi melalui sumbangan uang atau barang yang dikelola oleh TPPS atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Peran ini sangat penting untuk mempercepat implementasi program dan memastikan keberlanjutan intervensi dalam mengatasi *stunting*, dengan donasi seperti CSR dari Bank Jateng yang menyumbangkan Rp 200.000.000 pada tahun 2024. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Amanda, R. Z. T., & Widowati, N. (2024) yang menyebutkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan swasta yang ikut terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting*, melalui dana CSR yang dimiliki, mereka memberikan bantuan berupa uang, PMT, dan jamban untuk penurunan *stunting*.

Baznas juga berperan penting sebagai donatur dengan mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kebutuhan gizi keluarga berisiko *stunting*. Dukungan

Baznas, yang dikoordinasikan melalui TPPS, menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung program BAAS. Selain itu, OPD juga berkontribusi sebagai bapak asuh dengan sumbangan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keberadaan akselerator ini mempercepat pelaksanaan BAAS, termasuk penyediaan PMT dan intervensi lain seperti pembangunan jamban sehat, yang turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel Klasifikasi Peran Stakeholders

Klasifikasi Peran	Stakeholder
Policy creator	Bapperida
	Sekretaris daerah
Koordinator	TPPS Kabupaten Pati
Implementor	TP PKK Desa
	Kader Posyandu
	Masyarakat
Fasilitator	Dinas Kesehatan
	Dinas Sosial P3AKB
Akselerator	Donatur -Perusahaan Swasta (Bank Jateng, BAZNAS, dll) -OPD-OPD

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati

Destiana, dkk (2020) Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang pendorong dan penghambat dalam sebuah program.

a. Nilai

Dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), nilai-nilai tertentu berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat program dan memastikan keberhasilan yang mendorong partisipasi aktif dan komitmen dari berbagai pihak.

1. Nilai individual

Pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam upaya membangun organisasi agar dapat menjadi sukses (Olovsson, dalam Destiana, 2020). Kepemimpinan yang baik sangat penting dalam implementasi Program BAAS di Kabupaten Pati. Ketua TPPS, baik Sekretaris Daerah maupun Bapperida, menunjukkan sikap kepemimpinan koordinatif, yang tercermin dalam rapat koordinasi dan pembentukan Grup WhatsApp untuk membangun kerjasama tim dan integritas tinggi ini terbukti menjadi faktor kunci dalam efektivitas Program BAAS dan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pati.

2. Nilai organisasi

Nilai organisasi menjadi hal yang penting dalam mendorong peran para aktor dalam implementasi Program BAAS. Melalui kerjasama antar aktor yang terlibat, sehingga secara bersama-sama dapat mencapai tujuan program yaitu penurunan angka *stunting*. Menurut Salsabela, R. (2024) menjelaskan bahwa nilai organisasi

menekankan pentingnya kerja sama antara aktor yang mencerminkan keseriusan dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi, yang fokus pada penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pati. Nilai organisasi dalam Program BAAS terlihat dari kerjasama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, lembaga kesehatan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memastikan setiap pihak bergerak sejalan untuk mengentaskan *stunting* dengan mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.

Nilai-nilai individual dan nilai organisasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) untuk menciptakan sinergi yang mencegah ego sektoral.

b. Kebijakan

Kebijakan menurut Anderson (1979) adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh satu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan. Peran kebijakan sangat vital dalam semua aspek implementasi program. Salsabela, R. (2024) menyatakan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dasar hukum yang dibentuk melalui undang-undang dan Surat Keputusan (SK) yang berlaku.

Keberhasilan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati sangat bergantung pada landasan hukum yang kuat, seperti Surat Edaran dan Surat

Keputusan yang berlaku. Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 memberikan panduan strategis untuk pelaksanaan program ini. Kebijakan terkait lainnya, seperti Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1086 Tahun 2024, memperkuat dasar hukum dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. Implementasi kebijakan yang tepat menjadi kunci untuk menjaga perkembangan positif dan mengelola potensi konflik dalam program ini.

c. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi syarat penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program. Komunikasi memiliki peran dalam membantu mendukung pemahaman, keinginan, dan partisipasi *stakeholders* dalam implementasi program. Jika komunikasi yang terbentuk berjalan dengan lancar, maka dapat menciptakan hubungan yang positif (Hijrah, dalam Destiana, 2020). Menurut Gayatri, N. A. (2023) hingga saat ini belum ada halangan menjadi salah satu aspek faktor pendorong bagi peran *stakeholders* yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal antara OPD dalam TPPS di Kabupaten Pati berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi dan grup WhatsApp. Kedua platform ini mendukung kelancaran koordinasi, pembaruan data,

dan distribusi tugas. Namun, kendala muncul dalam komunikasi eksternal, khususnya dengan BAZNAS, yang merasa kurang puas dengan laporan pertanggungjawaban yang belum jelas. Untuk mengatasi hal ini, perlu perbaikan dalam saluran komunikasi dengan mitra eksternal, seperti laporan berkala dan komunikasi digital. Peningkatan transparansi dan frekuensi komunikasi dengan donatur akan memperkuat dukungan eksternal, sehingga mempercepat implementasi program BAAS dan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pati.

d. Kepercayaan

Kepercayaan menurut Destiana, dkk (2020) adalah keterlibatan yang kuat dengan berbagai informasi dan keahlian yang bertujuan untuk mengokohkan hubungan antar aktor yang terlibat. Kepercayaan memiliki peran sentral dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa anggotanya terus berpartisipasi dalam upaya kemajuan organisasi.

Kepercayaan antar aktor dalam Program BAAS di Kabupaten Pati sangat penting untuk keberhasilan program. Kepercayaan yang baik antara OPD dalam TPPS mendukung kerjasama yang efisien. Namun, ada kendala dalam membangun kepercayaan antara TPPS dan donatur, terutama BAZNAS, terkait kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. Hal ini mengurangi kepercayaan

donatur terhadap pengelolaan program. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, perbaikan dalam transparansi dan komunikasi, termasuk pelaporan yang lebih rinci, diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan antar *stakeholder*.

PENUTUP

Kesimpulan

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati telah berhasil diimplementasikan dengan cukup baik, terbukti melalui penurunan prevalensi *stunting* dari 23% pada tahun 2022 menjadi 18% pada tahun 2023. Program ini dinilai tepat dalam kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga sosial. *Stakeholders* dalam penurunan *stunting* melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati memiliki peran yang beragam dan saling melengkapi. Pemain kunci seperti BAPPERIDA, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial P3AKB berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. TP PKK Desa dan masyarakat menjadi pelaksana utama di lapangan, sementara TPPS dan Posyandu mendukung kebijakan melalui sumber daya dan layanan kesehatan yang terintegrasi. Pihak swasta melalui program CSR memberikan kontribusi

pendanaan sebagai pelengkap dukungan. Dalam implementasi, BAPPERIDA dan Sekretaris Daerah bertindak sebagai policy creator, TPPS sebagai koordinator lintas sektor, serta Dinas Sosial P3AKB dan Dinas Kesehatan sebagai fasilitator. TP PKK Desa dan Posyandu menjalankan fungsi implementor, sementara donatur menjadi akselerator yang mempercepat pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan pentingnya sinergi yang kuat untuk mencapai keberhasilan program secara efektif dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) meliputi komitmen individu dan organisasi, koordinasi yang rutin antar pihak terkait, serta integritas pemimpin yang kuat dalam menjalankan program. Selain itu, kebijakan yang jelas dan peraturan yang terstruktur memberikan pedoman strategis dan legalitas yang penting dalam pelaksanaan program. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Komunikasi eksternal yang kurang optimal, terutama dalam hal pelaporan yang jelas kepada donatur, mengurangi tingkat kepercayaan dan dukungan eksternal terhadap program. Selain itu, kepercayaan dari donatur, seperti BAZNAS, masih belum sepenuhnya terbangun, disebabkan oleh pengelolaan dan pelaporan program yang belum memadai. Keberhasilan program sangat bergantung pada perbaikan

dalam komunikasi dan transparansi dengan donatur untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan mereka.

Saran

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat yang telah diidentifikasi, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk mendukung keberhasilan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati:

1. Dalam meningkatkan komunikasi eksternal dengan donatur untuk memperbaiki hubungan dengan donatur seperti BAZNAS perlu diadakan pertemuan rutin dengan donatur untuk menjelaskan perkembangan program, menjawab pertanyaan, dan mendengar masukan mereka.
2. Dalam membangun kepercayaan dan dukungan donatur terhadap program Bapak Asuh Anak *Stunting* tetap terjaga, perlu untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan, detail, dan terstruktur, mencakup penggunaan dana, daftar penerima manfaat, dan capaian program. Laporan ini dapat memanfaatkan teknologi seperti platform digital atau sistem pelaporan berbasis online untuk mempermudah akses donatur terhadap informasi program.
3. Dalam implementasi program, sebaiknya diberikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berisi

mengenai bagaimana indikator pasti dari target penerima program, waktu pelaksanaan program, mengawasi keberjalanan atau monitoring dan mengkaji ulang terhadap pelaksanaan program yang berjalan supaya lebih diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Agri, T. A., Ramadanti, T., Adriani, W. A., Abigael, J. N., Setiawan, F. S., & Haryanto, I. (2024, July). Menuju pertumbuhan seimbang dalam tantangan SDGs 2 dalam penanggulangan kasus stunting di Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 128-144).
- Alifisyiam, F. N., Herawati, A. R., & Purnaweni, H. (2024). Peran *Stakeholders* Dalam Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-20.
- Gayatri, N. A. P., Warsono, H., & Santoso, S. (2023). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-14.
- Hermawan, M. F., Yudha, E. P., Kusno, K., & Nugraha, A. (2023). Konvergensi Aktor Kelembagaan Dalam Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Sumedang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 727-740.
- Ipa, M., Yuliasih, Y., Astuti, E. P., Laksono, A. D., & Ridwan, W.

- (2023). *Stakeholders' role in the implementation of stunting management policies in Garut Regency. Indonesian Journal of Health Administration*, 11(1), 26-35.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(3), 383-391.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penyebaran Covid-19 di desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Moreno, J. M., Chapman, A. J., Ebido, C. C., Sougou, N. M., Diallo, A. H., Tening, R.N., ... Harder, M. K. (2023). *Local contextual factors of child stunting found via shared values of stakeholder groups: an exploratory case study in Kaffrine, Senegal. Public Health Nutrition*, 26(11), 2418- 2432.
- Noerjoedianto, D., Ibnu, I. N., & Wisudariani, E. (2024). *Analysis of The Role of Stakeholders in Efforts to Reduce the Acceleration of Stunting: A Case Study in a Quality Family Planning Village Locus. Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 6(1), 372-386.
- Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 315-335.
- Perdana, R. A., & Aprilia, I. S. (2022). Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(2), 566-573.
- Prasetyo, A., Noviana, N., Rosdiana, W., Anwar, M. A., Harwijayanti, B. P., & Fahlevi, M. (2023). *Stunting convergence management framework through system integration based on regional service governance. Sustainability*, 15(3), 1821.
- Purnomo, D., Herwandito, S., Waruwu, K. J. I. M., Renyoet, B. S., & Mangalik, G. (2023). Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Salatiga dalam Peluang dan Tantangan. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 81- 98.
- Puspita, N. L., & Harsono, D. (2023). Stakeholder Analysis Dalam Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(2), 14.
- Salsabela, R. R., Santoso, R. S., & Subowo, A. (2024). Peran Aktor dalam Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 214-231.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127-144.
- Sitairesmi, M. N., Arjuna, T., Helmyati, S., Santosa, B., & Supriyati, S. (2023). *Engaging stakeholders to strengthen the local actions for stunting prevention and control in Lombok Barat. Journal of Community Empowerment for Health*, 6(1), 52-57.
- Situmorang, G. E. M., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2022). Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi

Covid-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 82.
Wardhani, L., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Peran Stakeholder dalam Percepatan Penurunan

Stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 725-740.